

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Buku-Buku

- A. T. Atmadja, *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, Dan Pencegahannya* (Kencana, 2019).
- Abu Fida Abdul Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta, Penerbit Republik, 2006,
- Arief, M. Irsan. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi)*. MCL Publisher, 2022.
- Bn Katsir, *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir, Jilid. I, terj. Abd. Ghaffar* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- Desmawati, Rahma, et al. *Dinamika Korupsi di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Fitriani, Umi. *Suara Generasi Tentang Budaya Antikorupsi*. CV Srikandi Kreatif Nusantara, 2021.
- Hasanal Mulkan, S. H. *Hukum tindak pidana khusus*. Prenada Media, 2022.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem sosial budaya Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Liliweri, Alo. *Pengantar studi kebudayaan*. Nusamedia, 2019.
- M. H. Kasiyanto, H. A., & SH, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa* (Prenada Media, 2018).
- M. H. Sumaryanto, A. D., & SH, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakad Media Publishing, 2020).
- M. Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik* (Universitas Brawijaya Press, 2017).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Jilid I (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000)*,
- M. S. Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. (Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- M. Thoha, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan* (Kencana, 2016).
- Mardani. *"Hukum Pidana Islam"* Kencana 2019
- Oktaviani, Adelia Tiara, et al. *Korupsi yang Membudaya di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2022.
- P. Eko, S., Khasanah, T. I. Widuri, D. Handayani, S. Handayani, N. & Qomariyah, *Desa Membangun Indonesia*. (FPPD. Yogyakarta., 2014).
- Primanto, Aji, and S. Sos. *Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia*. Zahira Media Publisher, 2023.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Kepemimpinan kepala desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Rosikah, Chatrina Darul, and Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika, 2022.

- Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021.
- Sabaruddin, Arief. *Ekosistem Perumahan*. PT Kanisius, 2023
- Simanjuntak, Efendi Lod. *"Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transnasional Pengantar Dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi."* (2021).
- Sumartana, *Penanggulangan Korupsi, Etika Kolusi dan dan Nepotisme di Era Reformasi*, (Aditya Media, Yogyakarta, 1999),
- Suparno, Basuki Agus. *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas, 2012.
- Tofik, Dr Tofik Yanuar Chandra, and MH SH. *"Buku: Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia."* (2022).
- Wardiyanto. B. Aminah. S. & Martanto. U., *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa* (Airlangga University Press., 2016).
- Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama, 2013.
- Yasin, Muhammad, et al. *"Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa."* Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO) (2015).
- Yunus, Eddy. *Manajemen strategis*. Penerbit Andi, 2016.
- Yusuf al- Qaradlawi, *Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)

Peraturan Perundang-undang

- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme." (1999).
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (2001)
- Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (1999)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah* (2011)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 *tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah*. (2016)
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat 14 tahun 2011 *tentang bedah rumah*. (2011)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 *"Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya"* (2018)

Sumber lain-Lain

- A.. Yusri, 'Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren Di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (2020)

- Anggreni, Nyoman Omy, and I. Nyoman Subanda. *"Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng."* *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4.2 (2020): 98-115.
- Asmara, Candra. *"Urgensi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa:(Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)."* *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13.21 (2016).
- Cremin, Peadar, and Mary Goretti Nakabugo. *"Education, development and poverty reduction: A literature critique."* *International Journal of Educational Development* 32.4 (2012): 499-506.
- Faiz, Pan Mohamad. *"Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)."* *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009): 135-149.
- Joesoef, Daoed. *"Aspek-Aspek Kebudayaan yang Harus dikuasai Guru, dalam."* *Majalah Kebudayaan* 1 (1982).
- Murdiyana, Murdiyana; Mulyana, Mulyana. *"Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia"*. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 2017, 73-96.
- N. Hayun Nurkholis, 'Sanksi Pengelapan Dana Bantuan Langsung.', *Repository Uin Raden Fatah*, (2023).
- Prayogi, Irwanda. *"Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Menggunakan Metode Topsis."* *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)* 1.1 (2018): 6-12.
- Rahma, Alvina Alya, et al. *"Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia."* *Jurnal Kewarganegaraan* 6.1 (2022): 2260-2269.
- Ramadani, Nur Fadillah. *Evaluasi Program Bedah Rumah (Studi Terhadap Penerima Manfaat Bantuan Bedah Rumah Di Desa Buntu Kunyi Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Rambe, Yuli Mutiah, and Syaad Afifuddin. *"Pengaruh pencantuman label halal pada kemasan mie instan terhadap minat pembelian masyarakat muslim (studi kasus pada mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)."* *Jurnal ekonomi dan Keuangan* 1.1 (2012): 14866.
- Reka Ratna Sari 'Deskriptif dampak psikologi masyarakat terhadap program Bedah and rumah di desa cahaya negri kecamatan sukaraja kabupaten Seluma, "Jurnal Sosial, (2018).
- Ridwan, H. R. *"Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Koneksi, Dan Nepotisme (KKN)."* *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11.27 (2004): 50-61.

- Rosyadi, Slamet. "Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 8.1 Juni (2014).
- Saputra, Jevi. "Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6.2 (2022): 241-249.
- THE Theory, OF Open, and Quantum Systems, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan', Oxford University Press, 1, (2002).
- Tinov, M., and Tito Handoko. "Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mewujudkan Otonomi di Desa-desa Pesisir: Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15.26 (2016): 98-111.
- Trian Azhari and others, 'Telaah Kajian Nepotisme Dalam Perspektif Islam', (2024).
- Ulfa, Rafida, et al. "Analisis faktor-faktor dalam pembangunan di desa sei putih kecamatan tapung kabupaten Kampar." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18.31 (2019): 54-63.
- V. H. Azhary, *Nepotisme Dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik Dan Birokrasi Di Indonesia* (Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra, 2019)
- Wardana, Data, and Geovani Meiwanda. "Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* (2017)
- Yanggo, Huzaemah T. "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap (KKNS) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Tahkim IX* 1 (2013): 1-20.
- Zaini. M. M., 'Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia', (2015).

Wawancara

- Buk N "Masyarakat Desa Daya Murni" 27 Desember 2024
- Buk Y "Masyarakat Desa Daya Murni" 27 Desember 2024
- DE "Masyarakat Desa Daya Murni Sekaligus Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah" 28 Desember 2024
- Jk. Warga Desa Daya Murni, 12 November 2024
- Manan Yulianto "Kepala Desa Daya Murni" 28 Desember 2024
- Mukadam Ketua Rt 07 "Sejarah Desa Daya Murni". 28 Desember 2024
- Munari "Selaku Transmigran Asli Dari Jawa Timur" 28 Desember 2024
- Nurcholis "Ketua Karang Taruna Desa Daya Murni" 29 Desember 2024
- Rokem Kaur Desa Daya Murni "Penyalur Bantuan Sosial Bedah Rumah". 28 Desember 2024